

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan komprehensif mengenai teori-teori atau referensi pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian yaitu hubungan antara perkembangan teknologi terhadap perkembangan usaha kecil ke bawah.

2.1 Kajian Teori

Bagian ini memberikan kejelasan mengenai pengertian dan teori yang relevan terkait dengan topik penelitian. Adapun pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta aplikasi SIM Nglarisi.

2.1.1 Perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Menurut Kompas.com, terdapat 196,7 juta pengguna internet di Indonesia selama kuartal kedua tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana terdapat 171,2 juta pengguna internet di Indonesia, jumlah tersebut mengalami peningkatan.

2.1.2 Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tertera pada detikFinance, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari suatu usaha menengah atau besar. usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil, sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau perusahaan besar dengan jumlah kekayaan bersih.”

2.1.3 Aplikasi SIM Nglarisi

Alat untuk mempromosikan nasi dan jajanan Kelompok Gandeng Gendong kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Platform Jogja Smart Service* yang merupakan layanan terpadu untuk karyawan dan warga Kota Yogyakarta ini dilengkapi dengan aplikasi Nglarisi. Nglarisi juga menyediakan pelayanan publik berupa kebutuhan makanan dan minuman ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Azka *et al.* (2021) menjelaskan bahwa teknologi dan informasi terus berkembang, kekurangan dan keterbatasan ini dapat diatasi dengan menggunakan layanan teknologi cerdas. Oleh karena itu, pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi di kota-kota besar seperti Kota Yogyakarta sangatlah penting.

Noveriyanto *et al.* (2018) juga menjelaskan bahwa dengan menyatukan beragam sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur dan aplikasi, pemerintah kota dapat memanfaatkan fenomena ini untuk membantu tujuannya dalam mengelola layanan publik berbasis informasi dan teknologi. Tujuan dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk membangun smart city. Untuk itu, pemerintah Kota Yogyakarta membuat aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dan mengintegrasikan semua layanan publiknya ke dalamnya.

Seperti yang dikutip dari artikel AntaraYogya, Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan kepada seluruh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sudah tercatat dalam kelompok Gandeng-Gendong untuk menggunakan aplikasi Nglarisi. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan maksud dan tujuan mewajibkan hal tersebut supaya data transaksi bisa tercatat dan dipantau oleh pihak pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bisa memantau perkembangan kelompok pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang dikutip dari Portal berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan bahwa aplikasi Nglarisi merupakan bagian dari program Gandeng-Gendong yang bertujuan untuk

mengatasi kemiskinan di Kota Yogyakarta. Beliau juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam operasional pemerintah melalui program ini, khususnya dengan menawarkan layanan snack untuk acara pertemuan, dengan total anggaran sebesar 42 miliar. Pihaknya tetap berkeyakinan bahwa UKM yang menawarkan jasa kuliner akan mampu mematuhi norma dan persyaratan yang telah ditetapkan. Beliau juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah kota juga bekerja sama dengan BPD DIY untuk menutup gap tersebut agar saat klik pesan snack, uang bisa dibuat secara real time dan langsung diterima pelaku UKM dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang ditawarkan BPD DIY.

